



PENGARUH PMTB, INFLASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN PROVINSI BALI

Anak Agung Mas Ari Adnyaswari¹ Ida Bagus Putu Purbhadharmaja²

Abstract

Keywords:

GFCF;
Inflation;
Minimum wage;
Growth;
Disparity.

This study aims to (1) analyze the direct effect of GFCF, inflation and minimum wages on economic growth in districts/cities in Bali Province, analyze the direct effect of PMTB, inflation and minimum wages on income disparities in districts/cities in Bali Province, (2) and analyze the influence of GFCF, inflation and minimum wages on income disparities indirectly through the economic growth of districts/cities in Bali Province. This research was conducted in the Province of Bali, with the data source from the Central Bureau of Statistics of the Province of Bali. The analysis technique used is Path analysis using data from 2010 – 2020. The results of data analysis show that (1) GFCF has a positive and significant effect on economic growth, (2) minimum wages have a positive and insignificant effect on economic growth, (3) inflation has a negative and significant effect on economic growth, (4) Inflation and the minimum wage have a negative and significant effect on income disparities, (5) GFCF has a negative and significant effect on disparity, and (6) GFCF, inflation, and the minimum wage have a negative and significant effect to income disparities through economic growth.

Kata Kunci:

PMTB;
Inflasi;
Upah Minimum;
Pertumbuhan;
Disparitas.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh langsung PMTB, inflasi dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, menganalisis pengaruh langsung PMTB, inflasi dan upah minimum terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) dan menganalisis Pengaruh PMTB, inflasi dan upah minimum terhadap disparitas pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis jalur *Path* dengan menggunakan data tahun 2010 – 2020. Hasil analisis data menunjukkan yakni (1) PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (4) Inflasi dan upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, (5) PMTB berpengaruh negative dan signifikan terhadap disparitas, dan (6) PMTB, inflasi, dan upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email:
gungmasariadnyaswari@gmail.com

PENDAHULUAN

Disparitas pendapatan mencerminkan ketimpangan pembagian hasil pembangunan suatu wilayah yang dapat dilihat dari pengeluaran penduduk (pendapatan) dan kewilayahan. Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan antar masyarakat maupun daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal (Pradnyadewi dan Purbadharmaja, 2017). Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini terbukti dari banyaknya negara sedang berkembang (NSB) yang pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat ketimpangan pendapatannya juga tinggi (Pramesti dan Yasa, 2019). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Hewi et al, 2017). Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta dapat mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi (Barros, 2015). Demikian pula yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Gejala ketimpangan dapat dilihat menggunakan Gini Rasio. Menurut data yang diperoleh dari BPS Provinsi Bali (2021), nilai gini rasio Provinsi Bali mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 Gini rasio di Provinsi Bali menunjukkan angka 0,366 sedangkan pada tahun 2020 Gini ratio Provinsi Bali mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya yakni pada angka 0,369. Kenaikan gini ratio Provinsi Bali disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Apabila dilihat melalui Indeks Williamson, diketahui bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali -9.31 dibanding tahun sebelumnya yang menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Williamson naik dari 0,26 menjadi 0,28. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Todaro (2003) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan begitu sebaliknya. Dalam penelitian ini, fenomena tersebut akan dianalisis melalui beberapa faktor diantaranya yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), inflasi, dan upah minimum.

Investasi dapat mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu terciptanya lapangan kerja (Rudi dkk, 2014). Menurut Sumadiyasa (2016) investasi memegang peranan penting dalam teori pembangunan, sehingga sering disebut sebagai *engine of growth*. Investasi yang bersifat penanaman modal langsung akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan output nasional. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah (Prasetyo, 2011). Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri kian memperoleh persebaran yang tidak merata, terbukti bahwa sebaran penanaman modal dalam negeri hanya terpusat di beberapa daerah yang memiliki potensi terbesar saja. Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Yasa (2019), serta Vina dan Bendesa (2020) menemukan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Eka dan Arka (2019), investasi dikatakan tidak memiliki pengaruh signifikan namun memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Faktor kedua yaitu inflasi, dimana inflasi yang moderat dan stabil mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tabungan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Ahmed dan Mortaza, 2005). Inflasi dapat diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK), merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Eka dan Arka (2019), inflasi secara langsung berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan yang negatif dengan

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Namun dalam penelitian Pramesti dan Yasa (2019), inflasi dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Didukung dengan penelitian Sasmitha dan Jember (2020), yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Faktor ketiga yaitu upah minimum, yang berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu untuk tenaga kerja dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran (Utami, 2018). Upah minimum adalah kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa para pekerja mendapat upah yang wajar sekaligus mengurangi ataupun mencegah kemiskinan pada pekerja yang mencakup pemenuhan standar kehidupan. Vina dan Bendesa (2020), menyatakan bahwa upah minimum secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 1) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inflasi dan Upah Minimum berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inflasi dan Upah Minimum memiliki pengaruh langsung terhadap Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 3) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inflasi dan Upah Minimum terhadap Disparitas Pendapatan berpengaruh secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, menurut Indeks Williamson menyatakan masih terjadi ketimpangan antar Kabupaten/Kota, karena belum terjadinya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB dan dinyatakan dalam persentase, disparitas pendapatan yang diukur dari Indeks Williamson dan dinyatakan dalam persentase, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), inflasi yang diukur dengan Kota Denpasar, Singaraja dan Nasional yang dinyatakan dengan satuan persentase, dan upah minimum yang dinyatakan dengan satuan Juta Rupiah. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan dari *cross section* (9 kabupaten/kota Provinsi Bali) dan *time series* (10 tahun penelitian yaitu 2011-2020), sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 90 data. Data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, serta jurnal terkait penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*). Adapun model persamaan yang digunakan yaitu:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

X_1 = Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

X_2 = Inflasi

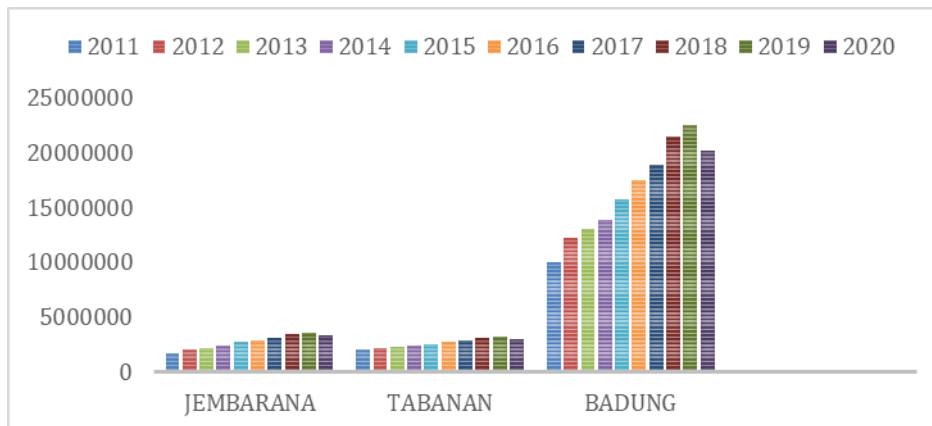
X_3 = Upah Minimum

Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 = Disparitas Pendapatan

$e_1 e_2$ = Variabel Pengganggu

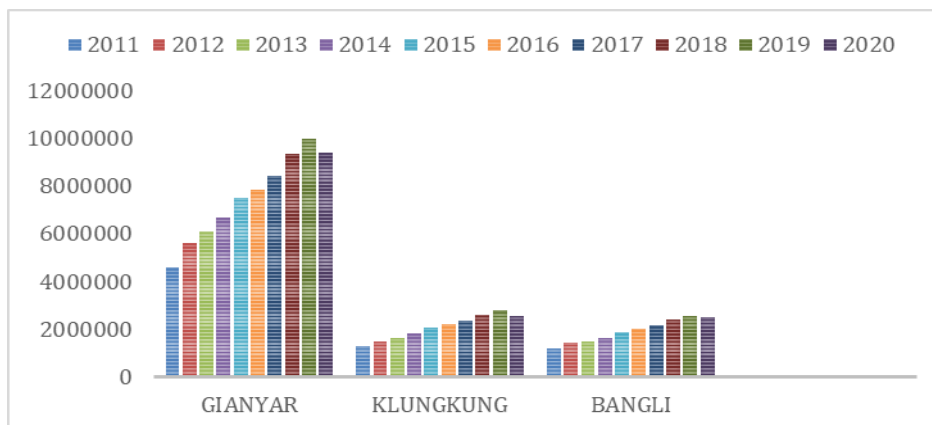
HASIL DAN PEMBAHASAN



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)

Gambar 1.

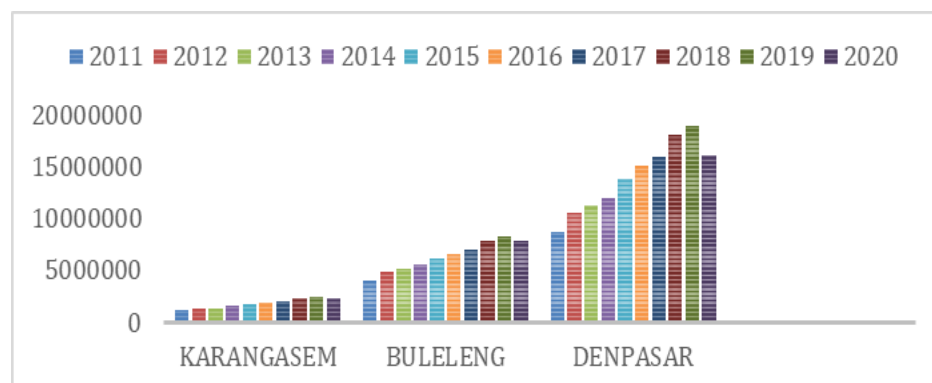
Pekembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Jembarana, Tabanan, dan Badung Tahun 2011-2020 (dalam juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)

Gambar 1.

Pekembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Bangli Tahun 2011-2020 (dalam juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)

Gambar 1.

Pekembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar Tahun 2011-2020 (dalam juta rupiah)

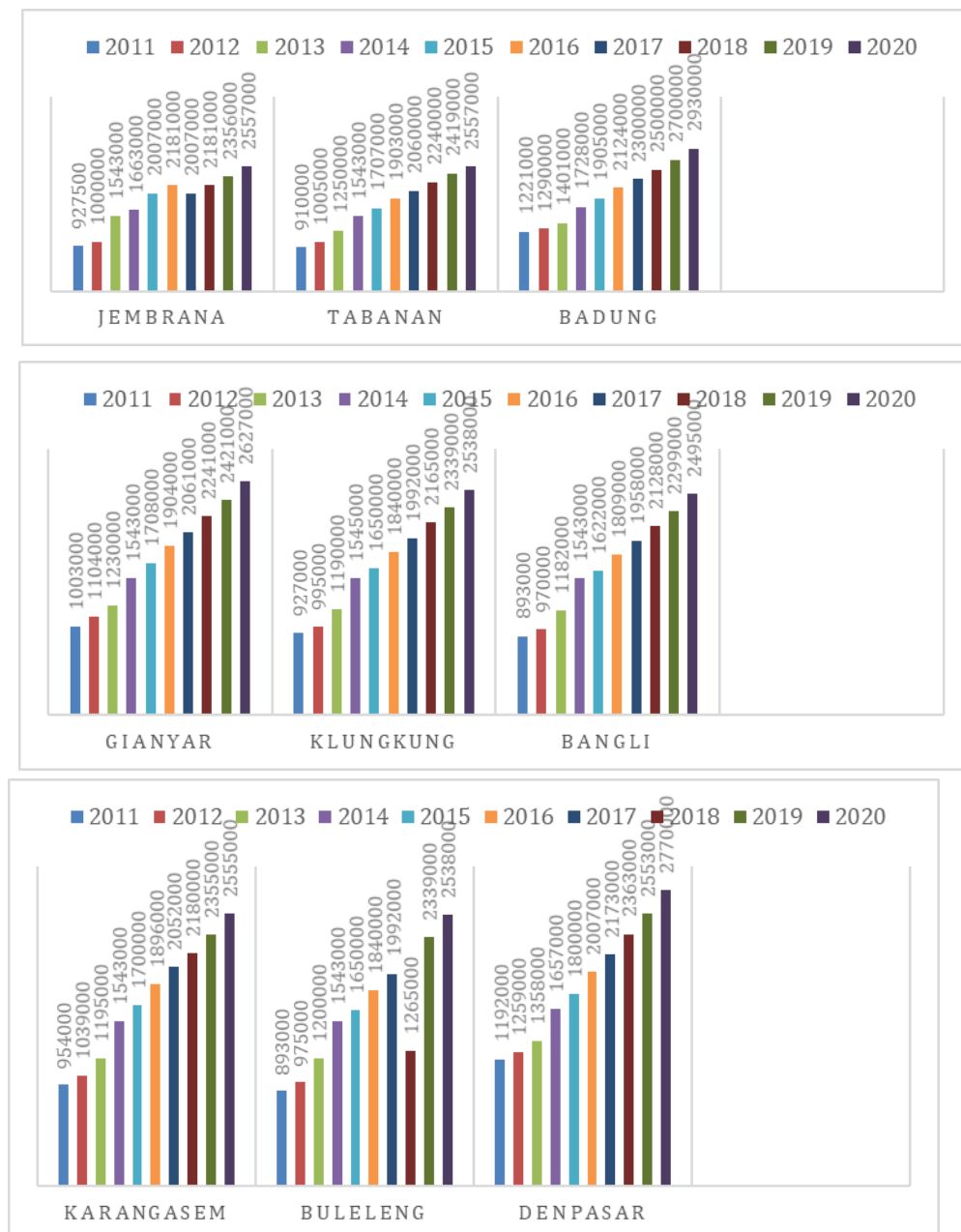
Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Perkembangan PMTB kabupaten/kota menunjukkan bahwa jumlah investasi tertinggi selama tahun 2011 – 2020 di Kabupaten Badung sebesar Rp 20.000.000 – Rp 25.000.000 sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar Rp 0 - Rp 2.000.000.

Tabel 1.
Pekembangan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2020 (dalam persentase)

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jembrana	3.75	4.71	7.35	9.17	2.80	3.70	3.34	2.64	2.39	1.51
2.	Tabanan	3.75	4.71	7.35	9.17	2.80	3.70	3.34	2.64	2.39	1.51
3.	Badung	3.75	4.71	7.35	9.17	2.80	3.70	3.34	2.64	2.39	1.51
4.	Gianyar	3.75	4.71	7.35	9.17	2.80	3.70	3.34	2.64	2.39	1.51
5.	Klungkung	3.75	4.71	7.35	9.17	2.80	3.70	3.34	2.64	2.39	1.51
6.	Bangli	3.75	4.71	7.35	9.17	2.80	3.70	3.34	2.64	2.39	1.51
7.	Karangasem	3.75	4.71	7.35	9.17	2.80	3.70	3.34	2.64	2.39	1.51
8.	Buleleng	3.75	4.71	7.35	9.17	2.80	3.70	3.34	2.64	2.39	1.51
9.	Denpasar	3.75	4.71	7.35	9.17	2.80	3.70	3.34	2.64	2.39	1.51

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)

Perkembangan inflasi di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2011-2020 menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2011 hingga tahun 2020 memiliki besaran yang sama. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 9.17 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 1.51 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)

Gambar 4.
Pekembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2020

Perkembangan upah minimum setiap kabupaten/kota selalu mengalami kenaikan yang beriringan, namun disisi lain jika di bandingkan masih terdapat perbedaan upah minimum di setiap kabupaten/kota. Kabupaten Badung selalu menjadi kabupaten yang memiliki upah minimum tertinggi sebesar Rp 2.930.000 pada tahun 2020 sedangkan kabupaten yang memiliki upah minimum paling rendah dari kabupaten/kota lainnya yakni Kabupaten Bangli sebesar Rp 2.495.000. Hal ini disebabkan karena pusat industry dan pariwisata terpusat sekira Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar sedangkan diluar wilayah tersebut perkembangan industry dan pariwisatanya tidak terlalu pesat.

Tabel 2.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2020
(dalam satuan persen)

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jembrana	5.89	6.11	5.69	6.05	6.19	5.96	5.28	5.59	5.56	-4.96
2.	Tabanan	6.11	6.12	6.45	6.53	6.19	6.14	5.37	5.71	5.59	-6.14
3.	Badung	7.07	7.64	6.82	6.98	6.24	6.81	6.08	6.73	5.81	-16.52
4.	Gianyar	7.15	7.08	6.82	6.80	6.30	6.31	5.46	6.01	5.61	-8.38
5.	Klungkung	6.11	6.25	6.06	5.98	6.11	6.28	5.32	5.48	5.42	-6.35
6.	Bangli	6.14	6.20	5.94	5.83	6.16	6.24	5.31	5.48	5.46	-4.10
7.	Karangasem	5.43	5.93	6.16	6.01	6.00	5.92	5.06	5.44	5.50	-4.45
8.	Buleleng	6.44	6.78	7.15	6.96	6.07	6.02	5.38	5.60	5.53	-5.76
9.	Denpasar	7.16	7.51	6.96	7.00	6.14	5.51	6.05	6.42	5.82	-9.31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung terdapat perbedaan yang sangat menonjol pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya wabah *Virus Covid-19* yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis dari tahun – tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tahun 2020 kabupaten yang paling terdampak yakni Kabupaten Badung yakni sebenar -16.52 persen, hal ini dikarenakan Kabupaten Badung salah satu kabupaten yang sangat mengandalkan pariwisata, sedangkan kabupaten yang paling sedikit mendapatkan dampak dari adanya wabah virus ini yakni Kabupaten Bangli sebesar -4.10 persen, hal ini dikarenakan penduduk di Kabupaten Bangli dominan bekerja di sector perkebunan dan pertanian.

Tabel 3.
Perkembangan Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2020
(dalam persentase)

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jembrana	0.293	0.292	0.287	0.283	0.277	0.273	0.271	0.270	0.260	0.280
2.	Tabanan	0.293	0.292	0.287	0.283	0.277	0.273	0.271	0.270	0.260	0.280
3.	Badung	0.293	0.292	0.287	0.283	0.277	0.273	0.271	0.270	0.260	0.280
4.	Gianyar	0.293	0.292	0.287	0.283	0.277	0.273	0.271	0.270	0.260	0.280
5.	Klungkung	0.293	0.292	0.287	0.283	0.277	0.273	0.271	0.270	0.260	0.280
6.	Bangli	0.293	0.292	0.287	0.283	0.277	0.273	0.271	0.270	0.260	0.280
7.	Karangasem	0.293	0.292	0.287	0.283	0.277	0.273	0.271	0.270	0.260	0.280
8.	Buleleng	0.293	0.292	0.287	0.283	0.277	0.273	0.271	0.270	0.260	0.280
9.	Denpasar	0.293	0.292	0.287	0.283	0.277	0.273	0.271	0.270	0.260	0.280

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021)

Perkembangan disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2011-2020 bahwa setiap tahunnya disetiap kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki disparitas yang sama, hal ini menyebabkan akan terus terjadinya adanya ketimpangan dalam pendapatan per kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 4.
**Hasil Uji Regresi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inflasi, dan Upah Minimum terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-22.778	11.381		-2.001	.048
	PMTB	57.291	4.691	0.976	12.214	.000
	Inflasi	-4.512	.431	-0.5266	-10.476	.000
	Upah Minimum	2.279	1.729	.091	1.318	.191

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Hasil uji diperoleh bahwa variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar 0.976 dengan sig. $0.000 < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Menurut Amri (2017) adanya pengaruh positif dan signifikan PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi, mengindikasikan bahwa pembentukan modal tetap bruto sangat penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa pembentukan modal menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini sesuai dengan temuan penelitian Ugochukwu & Chinyere (2013) serta Sunny & Osuagwo (2016) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pembentukan modal secara langsung dapat meningkatkan produksi nasional yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Variabel inflasi dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0.526 dengan sig. $0.000 < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sejalan dengan hasil penelitian Susanto (2013) bahwa secara parsial dan simultan tingkat inflasi, jumlah tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Adanya inflasi atau kenaikan harga akan menjadi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Inflasi berdampak buruk pada perekonomian khususnya pada redistribusi pendapatan dan terjadinya distorsi harga, distorsi penggunaan uang dan distorsi pajak Menurut Samuelson dalam Djohanputro (2006:153), sehingga akan berdampak negatif pada pertumbuhan perekonomian.

Variabel upah minimum dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar 0,091 dengan sig. $0.191 > 0.05$ menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sejalan dengan teori Studi Askenazy (2003) yang menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif. Hasil analisis data Utami (2018) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten selama tahun 2010-2016.

Tabel 5.
Hasil Uji Regresi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inflasi, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.458	.030		15.228	.000
	PMTB	.092	.020	0.026	4.591	.000
	Inflasi	-.006	.002	-0.329	-3.489	.001
	Upah Minimum	-.032	.005	-.537	-7.020	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	-.002	.000	-.863	-7.284	.000

a. Dependent Variable: Disparitas Pendapatan

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar 0.026 dengan sig. $0.000 < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan disparitas kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sejalan dengan penelitian Hartini (2017) menyatakan bahwa dari hasil regresi diketahui variabel penanaman modal tetap bruto secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan.

Variabel inflasi dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0.329 dengan sig. $0.001 > 0.05$ menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Didukung oleh penelitian Ramada (2019) menyebutkan bahwa inflasi yang ada disuatu daerah pada umumnya akan terjadi serentak yang dimana ini bertolak belakang dengan disparitas pendapatan. Hasil pengujian didapatkan pengaruh inflasi terhadap disparitas negative dan signifikan, jika terjadi kenaikan inflasi maka akan mempengaruhi penurunan disparitas disuatu daerah.

Variabel upah minimum dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0,537 dengan sig. $0.00 < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0,863 dengan sig. $0.00 < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian Anshari (2019) juga menemukan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, artinya ketika terjadi peningkatan satu persen pada upah minimum provinsi maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Demikian pula pada penelitian Nangarumba (2015), bahwa upah minimum Provinsi berhubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga jika yang ingin diwujudkan adalah pemerataan pendapatan maka diperlukan peningkatan kinerja sektor pertanian dan jasa, peningkatan upah minimum provinsi, peningkatan anggaran belanja modal, dan peningkatan kredit investasi.

Hasil uji pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai mutlak z hitung sebesar $0,5195 < 1,96$ yang merupakan nilai z table, yang berarti pertumbuhan ekonomi (Y1) tidak merupakan variable mediasi perngaruh tidak langsung Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap diparitas pendapatan. Hasil uji pengaruh inflasi terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai mutlak z hitung sebesar $|-8,788| > 1,96$ yang merupakan nilai z table, yang berarti pertumbuhan ekonomi (Y1) merupakan variable mediasi perngaruh tidak langsung inflasi terhadap diparitas pendapatan. Hasil uji

Pengaruh Pmtb, Inflasi dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Provinsi Bali,

Anak Agung Mas Ari Adnyaswari dan Ida Bagus Putu Purbhadharmaja

pengaruh upah minimum terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai mutlak z hitung sebesar $|-0,517| < 1,96$ yang merupakan nilai z table, maka H_0 diterima yang berarti pertumbuhan ekonomi (Y_1) tidak merupakan variable mediasi perngaruh tidak langsung upah minimum terhadap diparitas pendapatan. Hal ini membuktikan bahwa meningkatnya partumbuhan suatu daerah akan mendorong daerah lainnya untuk lebih mengembangkan dan mengolah potensi-potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat menurunkan kesenjangan pendapatan di daerah tersebut. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah meningkat maka secara tidak langsung disparitas pendapatan akan menurun.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pembentukan modal secara langsung dapat meningkatkan produksi nasional yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif. Inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pada redistribusi pendapatan dan terjadinya distorsi harga, distorsi penggunaan uang dan distorsi pajak. Inflasi dan upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, karena jika terjadi kenaikan inflasi maka akan mempengaruhi penurunan disparitas disuatu daerah, begitu pula jika terjadi kenaikan upah minimum di salah satu daerah maka akan mempengaruhi disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh negative dan signifikan terhadap disparitas, karena pembentukan modal memiliki kecendrungan bertolak belakang dengan disparitas pendapatan, semakin meningkat pembentukan modal maka nilai disparitas pendapatan semakin turun. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), inflasi, dan upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi disuatu daerah yang tidak merata pembangunannya mampu mengakibatkan diparitas pendapatan. Sesuai dengan hipotesis Kuznet bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan, semakin baik pertumbuhan ekonomi maka disparitas akan semakin menurun.

Pertumbuhan ekonomi di setiap daerah diharapkan dapat terus di kembangkan secara maksimal karena banyak potensi yang ada di di daerah namun belum maksimal dikembangkan sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik maka upah minimum perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan secara resmi untuk memajukan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengendalian inflasi tidak selamanya harus diminimalkan, inflasi yang stabil dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik. pemerintah juga diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat membantu perekonomian masyarakat yang tinggal didaerah tersebut agar dapat menekan inflasi yang ada terjadi di daerah. Masyarakat dijarapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi agar pendapatan daerah setiap tahunnya meningkat dan dapat menaikkan upah minimum didaerah tersebut.

REFERENSI

- Ahmed, S., and Mortaza, G., (2005), "Inflation and Economic Growth in Bangladesh: 1981- 2005". Policy Analysis Unit (PAU) Working Paper 0604.
- Amri, Khairul, and Hasdi Aimon. (2017) "Pengaruh pembentukan modal dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia." *Economac* 1.1: 1-16.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494-502.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2020. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Bali. BPS Provinsi Bali. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2021. PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali 2014-2018. Web: Bali.Bps.go.id Diakses 4 Maret 2021
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2021. Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali 2014-2018. Web: Bali.Bps.go.id Diakses 8 Maret 2021
- Barros, P. P. (2015). Article Information: *Advances in Health Economics and Health Services Research*, 22: 3–27.
- Eka Jayanthi, Ni Kadek., & Sudarsana Arka. 2019. Analisis Pengaruh Investasi, Ekspor, Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(9): 2102-2132.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. *Journal of Economics and Public Policy*, 2(1), 69-79.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6, 255-285.
- Pramesti, Dewa Ayu Dwi Gita & Yasa, I Nyoman Mahaendra (2019). Pengaruh Investasi Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8, 2562-2590
- Prasetyo, E. (2011). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Periode Tahun 1985. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ramada, H., Arif, M., & Dev, S. M. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah, Disparitas Pendapatan, dan Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sunny, I. O., and C. N. Osuagwo. (2016) Impact of Capital Formation on the Economic Development of Nigeria, Fifth International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences..ChennaiIndia.1-3 April.
- Susanto, Aris Budi. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1.3 (2013).
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Utami, P. S. (2018). PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BANTEN TAHUN 2010–2016 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten).
- Ugochukwu, U. S., and Chinyere, U. P. (2013) The Impact of Capital Formation on the Growth of Nigerian Economy, *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(9):36-42